

Politik Ulama & Ulama Politik

Oleh Dr Nispul Khoiri, M.Ag

Politik hari ini semakin membutuhkan politik ulama. Ukuran kebutuhan tersebut dapat dilihat ketika politik memanas dalam Pilkada – Pil DPR/DPRD – Pilpres maka nasehat dan petunjuk ulama dibutuhkan

Diskursus peran dan tugas ulama tidak pernah selesai dalam perpolitikan di Indonesia baik di kalangan ulama itu sendiri maupun di mata publik. Ulama selalu dibicarakan karena peran ulama begitu penting dan strategis. Kebutuhan terhadap ulama menjadi pemandu dalam berbagai dimensi kehidupan, mulai dimensi agama, sosial, ekonomi, budaya, politik dan lainnya. Kemudian pemikiran ini terbelah kepada dua pektiran. *Pertama*, menginginkannya ulama fokus dan *concern* pada aspek keagamaan *an-sich*. *Kedua*, adanya pikiran lain menghendaki keterlibatan luas ulama di berbagai dimensi kehidupan termasuk bidang politik.

Pada pikiran pertama, ulama dikendaki oleh sebagian umat menjadi elit agamamurni domain wilayah ibadah, khutubah, ceramah dan segala urusan terkait dengan "Alif – Ba – Ta". Jika ulama berpolitik dan politik ulama, konsekuensinya ulama temajralakan, dan tidak populer lagi di tengah masyarakat sebagai pendakwah/pengkhotbah. Pikiran ini memandang ulama berpolitik praktis merupakan hal tabu, seharusnya ulama bersikap asketis untuk menjaga jarak dengan dunia perpolitikan. Dalam paradigma masyarakat, ulama berpolitik senantiasa bermuatan ideologi politik tertentu bahkan berafiliasi partai politik. Biasanya konstelasi politik tidak mengenal *wah-wah solution* selalu muncul *wah-wah and wah-wah*, yakni memenangkan hati rakyat dan berpikir meminimalkan *status quo*. Pada pikiran kedua menginginkan ulama harus berpolitik praktis (*fikrah – harakah – amaliyah*).

Orang-orang baik dibutuhkan di brokrat (eksekutif - yudikatif) dan politisi (legislatif). Dorongan untuk mengantar ulama menjadi kepala daerah, parlemen hingga calon presiden adalah sebuah kemiskinan. Ulama harus memberikan solusi terhadap persoalan kebangsaan dan kenegaraan. Ilmu dan agama harus menjadi kontrol kuat di tengah konstelasi politik kebangbang. Ulama harus menjadi penyebut pen-

keterlibatan ulama untuk mendesain strategi politik, berupa pikiran-pikiran strategis baik secara kolembagaan maupun individual melalui *ijma* (kesepakatan ulama) disampaikan dalam bentuk fatwa (legal opini) atau pun lainnya. Ulama sebagai *central* politik kemudian melalui politik ulama melahirkan/ mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis terhadap persoalan kebangsaan dan kenegaraan atau terlibat langsung pada peristiwa politik (Pilkada – PilDPR/DPRD – Pilpres). Sedangkan ulama politik adanya keterlibatan ulama berpolitik praktis baik secara personal maupun kolektif. Posisi ulama di sini lebih diorientasikan sebagai komoditas politik dalam berbagai kebijakan kenegaraan maupun pada peristiwa politik seperti Pilkada – Pilpres.

Dalam konteks perpolitikan di Indonesia dan menasuki tahun politik, keterlibatan politik ulama dapat menjadi sebuah kebutuhan dalam memberikan kemasaalahan keumatan. Politik ulama harus didorong dan diberikan kesempatan seluas-luasnya. Terlebih ulama bersangkutan mempunyai kapabilitas kualitas individual, integritas moral dan kemampuan dalam berpolitik. Kesadaran ideologi dan politik ulama harus dikembangkan. Jika muncul segala pikiran-pikiran dipolitisasi peran ulama harus dalam wilayah negara dan politik harus diabaikan. Karena ini bermplikasi kepada hilangnya peran politik ulama sebagai elemen strategis yang juga turut mengontrol negara terutama mempengaruhi kebijakan publik lebih baik lagi.

Ekstensi ulama sangat penting sepanjang kehidupan kemasyarakatan. Bahkan tidak ada satu perubahan dalam kehidupan yang tidak melibatkan ulama termasuk dalam berpolitik (langsung/tidak langsung). Bahkan bukan saja ulama siapapun dia sebagai manusia telah dianggurahkan adanya potensi berpolitik dalam diri. Agaknya inilah yang diungkapkan Aristoteles (384 – 322 M) pada karyanya berjudul *Politics* bahwa semua manusia pada dasarnya berpolitik (*man is by nature a political animal*).

ran. 11. QS. al-Araf: 36-37-39-147, 182. QS. Thaha: 51. QS. al-Ankabut: 48-49-68 dan QS. az-Zumar: 59. QS. Ali Imran: 32, QS. Asy Sura: 5-6, QS. az-Zuhruf: 36 dan QS. al-Jin: 17. Ulama juru bicara aspirasi dan kepentingan umat Islam. Ulama integrator umat yang mampu menyatukan seluruh potensi umat (QS. al-Baqarah : 213, QS. Yunus: 19). Ulama menjadi rujukan umat dalam mengatasi persoalan (QS. an-Nahl : 43 - 44, QS. al-Anbiya : 7).

Dalam konteks politik kontribusi politik ulama bukan hal baru. Islam sebagai sebuah agama mendorong ulama berpolitik. Kajian politik Islam (*siasah*) telah memberikan panduan dan tuntunan berpolitik. Dorongan tersebut tidak saja ditemukan dalam perintah *nash* (Alquran – Alhadis). Mulai dari proses menentukan politik kenegaraan, politik kerakyatan dan politik dan politik kekasaan. Peran ulama tidak saja mengaiti pesan terkandung dalam Ayuran, tetapi juga mengimplementasikan hukum terkandung dalam *nash*, termasuk persoalan politik.

Ulama sebagai pewaris Nabi bertanggungjawab/mengembangkan amanah menyuarikan/membawa perubahan sesuai keinginan syariat itu sendiri (QS. ar-Rad/13 : 11, QS. Muhammad/47 : 7, QS. al-Anfal/8: 62, QS. Hud/ 88 dan lainnya). Maka politik bagian dari instrumen membangun perubahan/peradaban yang membutuhkan politisasi adil, berilmu, takwa, *wara'* dan lain sebagai kualifikasi pemimpin. Menurut Al-Mawardi (972 H – 1058 M) seorang pemikir politik abad pertengahan mengatakan, ulama adalah orang sudah tepat menjadi pemimpin karena dalam diri ulama memenuhi kualifikasi pemimpin.

Sejarah perpolitikan di Indonesia juga mencatat peran ulama dalam berpolitik telah memberikan kontribusi besar. Sepanjang abad 19 hingga abad 20 agitasi militan ulama menentang penjajah hingga mengantarkan proses pendirian negara dan Indonesia merdeka adalah bagian politik ulama. Politik ulama berhasil mengumandangkan resolusi jihad, menyetujui asas tunggal Pancasila, menggelorakan reformasi dan berbagai kebijakan strategis membangun negeri ini merupakan langkah politik dari peran ulama.

Konstelasi politik hari ini semakin membutuhkan politik ulama. Ukuran kebutuhan tersebut dapat dilihat ketika politik memanas dalam Pilkada – Pil DPR/DPRD – Pilpres maka nasehat dan petunjuk ulama dibutuhkan. Ketika proses

etika tentang pengelolaan negara. Sedangkan umara mengadopsi dan menjadikannya sebagai sistem kekuatan negara. Maka umara berkewajiban menjaga ulama dari berbagai ancaman membahayakan ulama itu sendiri.

Dalam sebuah Hadis Rasulullah SAW disebutkan: *Permisalan para ulama di Bumi seperti bintang-bintang di Langit, digunakan sebagai petunjuk dalam kegelapan daratan dan lautan. Jika bintang-bintang itu hilang dikawatirkan orang yang menjadi petunjuk menjadi sesat* (HR. Ahmad). Seiring memperkuat eksistensi politik ulama tersebut, maka ulama didorong untuk semakin meningkatkan temponnya dalam bentuk memperluas pemahaman keilmuan politik, guna memperkuat kapasitas politik ulama, sehingga perannya semakin tajam, konstruktif memberikan kontribusi kepada politik kenegaraan, kerakyatan dan kekuasaan di negeri ini.

Penulis adalah Pengurus Wilayah Nahdhatul Ulama Provinsi Sumatera Utara.

Pengumuman

Redaksi menerima kiriman karya tulis berupa artikel/opini, surat pembaca. Kirim ke alamat redaksi dengan tujuan 'Redaktur Opini Waspada' dengan disertai CD atau email: opiniwaspada@yahoo.com. Panjang artikel 5.000-10.000 karakter dengan dilengkapi biodata dan kartu pengenal (KTP) penulis. Naskah yang dikirim adalah karya orisinal, belum/tidak diterbitkan di media manapun. Isi tulisan menjadi tanggung jawab penulis.

SUDUT BATUAH

* Wali Kota jamuan makan malam bersama tim PSMS - *Paten kallah, he...he...he*

* Polisi pabirik arca mawarga Belawan - *Jangan biarkan jiwa manusia hancur karena polusi*

* BBPOM belum maksimal awasi